

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KANTOR UPTD PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

**NANDA SIRFANA
NIM : 10975006884**



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KANTOR UPTD PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

OLEH

**Nanda Sirvana
NIM : 10975006884**



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KANTOR UPTD PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh : Nanda Sirfana

Penelitian ini dilakukan di kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dalam pemungutan pajak. Adapun populasi yang dijadikan sampel berjumlah 100 responden, penentuan jumlah sampel di dasarkan pada metode Slovin, data yang digunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau Baik, namun dalam hal prakteknya masih belum efektif dengan kata lain target dan realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau belum sesuai dengan yang ditargetkan UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau pada tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau ditargetkan sebesar Rp.4.787.431.481,00 yang terealisasi sebesar Rp.2.007.257.285,00 atau sekitar 42%. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan pihak UPTD harus meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan ke rumah-rumah masyarakat atau wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya ke UPTD, supaya masyarakat mau atau tidak enggan untuk mendaftarkan objek pajaknya ke UPTD Pendapatan daerah Kecamatan Mandau dan diharapkan kesadaran dan peran serta masyarakat lebih ditingkatkan lagi dan memiliki rasa tanggung jawab akan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar PBB.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Sang Khalik dan makhlukNYA, Maharaja dari segala raja. Rabbnya semua alam semesta, Sang Cahaya atas segala cahaya, yang kasih sayangnya melebihi Maryam terhadap Isa. Hanya Dialah Yang Wujud, Yang Baqo, dan atas perkenan-Nya pula sezarroh kuasanya-Nya ini dinisbikan dari ketiadaan, sebagai pujian, pembelajaran, dan menjadi suatu ruas jalan penghambatan bagi diri ini, seseorang yang baru memulai mencoba mengenali hakikat makhluk pada dirinya, demi untuk mengenal Khlik-Nya.

Salam kemulian bagi kekasih-Nya, yang hanya baginya seorang semua diwujudkan dari ketiadaan, sang cermin dari maha raja cahaya, sang senyum dari yang maha penyayang. Kekasih dari semua pecinta, Rasulullah Muhammad SAW, pembimbing bagi siapa yang mencarinya.

Puji syukur penulis kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR UPTD PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS (Dalam Study Kasus Pembayaran PBB).”*

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing skripsi saya Bapak **Muslim, S.Sos M.Si** atas ketidak sempurnaan karya ini. Walau demikian, disela-sela kesibukan Bapak yang

banyak, tetap bersedia saya repotkan dan tetap membimbing saya dengan sepenuh hati.

Buat Bapak **DR. Mahendra Romus SP M.Ec** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Bapak **Afrizal, S.Sos, M.Si** selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak **Rusdi, S.Sos, MA** selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, dan seluruh Dosen Pengajar yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya semoga apa yang telah Bapak dan Ibu berikan mendapatkan ridho dari Allah SWT, Amin y Rabb.

Terima kasih dan tersayang bagi orang-orang yang memberikan saya motivasi untuk berjuang dalam menggapai cita-cita, yaitu:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan memperhatikan saya mulai dari ayunan hingga saat ini yaitu **M.Nasir** (Papa) dan **Rosna** (Mama). Do'a dan Jasa mu kan selalu menemani perjalanan hidup dan mati ku, terimakasih atas do'a, kesabaran dan ketabahan menunggu harapan saya dan mereka. Saya sayang mama dan papa.
2. Buat kakak ku Zul Hendri S.Hi dan Haris Saputra S.E dan adek ku tersayang Intan Yulia Sari yang tidak henti-hentinya memberikan support, dukungan , serta motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Zulkifli Selaku Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, dan Bapak ibuk pegawai kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mengadakan penelitian di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
4. Terima kasih buat sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu membantu baik dalam hal motivasi dan kepeduliannya, Romi Syafril, Parhimpunan, Vifira, Pipin Suryani, Indra Gunawan, Reza Febrian, Iin, Rahmi dan kawan-kawan seperjuangan Administrasi Lokal B, Angkatan 2009. Terus berjuang dan gapailah cita-cita yang telah diharapkan oleh mu dan keluarga mu.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhirnya kepada Allah yang Maha Kuasa penulis serahkan, karena Dialah yang Maha Sempurna dan Maha Besar, dan semoga skripsi ini bias bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca serta menjadi rujukan atau referensi bagi yang melakukan penelitian dalam hal yang sama.

Pekanbaru, 02 Mei 2013

Nanda Sirfana

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Pengertian Otonomi	10
2.2. Jenis-Jenis Pajak	14
2.3. Pajak Pusat	16
2.4. Sistem Pemungutan Pajak	17
2.5. Pajak Bumi dan Bangunan	19
2.5.1 Cara atau Mekanisme Daftar PBB.....	24
2.5.2 Dasar Pengenaan Pajak	25
2.6. Partisipasi Masyarakat	25
2.7. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	32
2.8. Definisi Operasional	34
2.9. Konsep Operasional	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	39
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	39

3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4. Populasi dan Sampel	42
3.5. Teknik Analisis Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1. Keadaan Geografis.....	45
4.1.1. Pemerintah	45
4.1.2. Ekonomi	46
4.1.3. Hasil Bumi	47
4.1.4. Fasilitas dan Infrastruktur	48
4.2. Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	49
4.2.1. Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	49
4.2.2. Struktur Organisasi Unit Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	53
4.2.3. Uraian Tugas (Job description) bagian/unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Pemunutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau	58
5.1.1. Pendaftaran dan Pendataan	58
5.1.2. Pembayaran	66
5.1.3. Sanksi	73
5.1.4. Sosialisasi atau Penyuluhan.....	79
5.2. Upaya yang dilakukan Oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	87
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	90
6.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara sedang membangun dan pembangunan yang dilakukan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan baik di Negara maju, Negara yang sedang berkembang, maupun Negara yang terbelakang sekalipun. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang yang juga menyelenggarakan kegiatan pembangunan Nasional secara bertahap dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia membutuhkan dana atau pembiayaan yang sangat besar jumlahnya. Dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemasukan dana yang diterima oleh negara diperoleh dari dua sumber yaitu penerimaan dari dalam negeri dan bantuan luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri diperoleh dari sektor minyak dan gas (migas) dan dari sektor non migas (pajak dan non pajak). Sedangkan bantuan dari luar negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Perekonomian dan stabilitas politik. Sedangkan penerimaan disektor migas sesuai

dengan hukum alam jika dieksploitasi secara terus menerus akan habis. Semestinya pajak dipungut tanpa terlalu membebani rakyat dan adil dalam pelaksanaannya.

Peranan masyarakat dalam keikutsertaan menjalankan roda pemerintahan amat besar. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa pelayanan untuk umum, membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, perumahan, air minum, listrik, transformasi, fasilitas keamanan, dan banyak hal lainnya yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan Negara.

Akses timbal balik yang langsung dapat dirasakan masyarakat dengan keikutsertaan secara aktif dalam membayar pajak adalah mereka mempunyai potensi untuk bersuara dan mengontrol pemerintah, karena pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah sebagian besar dibiayai oleh pajak. Disisi lain selaku masyarakat tidak boleh lupa pajak merupakan bentuk tanggung jawab warga Negara dalam menjalankan kehidupan bernegaranya.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah penerimaan Negara yang paling potensial. Penerimaan Negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain pendapatan negara dari sektor pajak merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat

disuatu Negara. Jadi dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha melibatkan rakyat dalam pembangunan.

Dampak Pajak Bumi dan Bangunan ini akan terasa dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah terutama dengan adanya perkembangan Otonomi Daerah yang didukung dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari seluruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah sebesar 90% dan 10% ditahan sebagai penerimaan Pemerintah Pusat.

Lebih ditegaskan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subyek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk kedalam pajak negara yang dipungut oleh pemerintah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sehingga dapat meningkat kehidupan masyarakat. Tapi senyatanya Masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak,

banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran PBB.

Hal ini terlihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel I.1 : Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak Yang Patuh Dalam Membayar PBB di Kecamatan Mandau

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Yang Patuh	Persentase (%)
1.	2010	45.921	11.752	25,6%
2.	2011	50.842	13.526	26,6%
3.	2012	50.445	11.470	22,7%

Sumber : Kantor UPTD Dipenda Kecamatan Mandau 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak pada tahun 2010 sebanyak 45.921, yang patuh hanya sebanyak 11.752 wajib pajak atau 25,6%, kemudian pada tahun 2011 jumlah wajib pajak sebanyak 50.842 yang berpartisipasi sebanyak 13.526 wajib pajak atau 26,6%, dan pada tahun 2012 jumlah wajib pajak sebanyak 50.445 yang berpartisipasi hanya sebanyak 22,7%.

Dengan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, maka target yang telah ditetapkan oleh UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau tidak akan terealisasi. Hal ini terlihat dari tabel berikut :

Tabel I.2 : Target dan Realisasi Penerimaan PBB Di Kecamatan Mandau

No	Tahun	Target (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	Persentase (%)
1.	2010	4.016.298.837	1.899.537.870	47,29
2.	2011	4.004.907.153	1.530.657.937	38,21
3.	2012	4.787.431.481	2.007.257.285	41,92

Sumber : Kantor UPTD Dipenda Kecamatan Mandau 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir penerimaan PBB selalu gagal untuk memenuhi target PBB yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100%. Yang mana pada tahun 2010 dengan target Rp.4.016.298.837,00 yang terealisasi hanya Rp.1.899.537.870,00 atau 47,29% dari target, pada tahun 2011 terealisasi lebih rendah dari 2010 tapi dengan target Rp.4.004.907.153,00 yang terealisasi hanya Rp.1.530.657.937,00 atau 38,21%, dan pada tahun 2012 terealisasi lebih tinggi dari tahun 2011 tetapi juga belum mencapai 100% dengan target Rp.4.787.431.481,00 yang terealisasi atau tercapai hanya Rp.2.007.257.285,00 atau 41,92% dari target.

Berkaitan dengan tidak tercapainya atau terealisasinya target yang ditentukan, pemerintah setempat sudah membuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa denda. Bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak dari tempo/waktu yang telah ditentukan maka masyarakat akan dikenakan denda 2% perbulan dari total nilai pajak, bagi masyarakat yang tidak pernah melakukan pembayaran PBB karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut juga akan dikenakan denda yang sama yaitu 2% perbulan.

Kemudian salah satu penyebab rendahnya terealisasi target yang ditentukan yaitu pegawai UPTD tidak melakukan sosialisasi kerumah-rumah wajib pajak, karena dengan sosialisasi atau penyuluhan wajib pajak lebih tahu tentang fungsi dan kegunaan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Saat peneliti melakukan observasi di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, dengan tujuan untuk mendapatkan data awal tentang

sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dilakukan oleh UPTD Pendapatan Daerah kepada masyarakat di kelurahan atau desa diwilayah Kecamatan Mandau, dan kemudian pegawai UPTD Pendapatan Daerah menjawab sebagai berikut: *“Kami disini perpanjangan tangan dari Dispenda Kabupaten Bengkalis, dan untuk kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kekelurahan atau desa yang ada di Kecamatan Mandau memang tidak pernah kami lakukan, karena tidak adanya perintah dari Dispenda atau Kepala UPTD Pendapatan Daerah untuk melakukan kegiatan tersebut”* (Hasil wawancara). Dari hasil wawancara, peneliti mempunyai gambaran umum ternyata pihak UPTD Pendapatan Daerah tidak melakukan sosialisasi atau penyuluhan kekelurahan atau desa yang ada di Kecamatan Mandau.

Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Keuangan Negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka, diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas pemungut, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri.

Dari latar belakang yang telah di kemukakan di atas, penulis ingin meneliti dan melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis?
2. Strategi apa yang digunakan oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran pada masyarakat bagaimana cara dan prosedur dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Sumbangan pikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini.
3. Sebagai bahan informasi peneliti-peneliti lainnya, dengan permasalahan yang sama.
4. Dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan skripsi ini, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mengemukakan teori yang melandasi pembahasan skripsi yang meliputi kepuasan kerja karyawan dan variabel variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, hipotesis penelitian, variabel penelitian, dan variabel operasional.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum tempat penelitian, keadaan dan komposisi pegawai, struktur organisasi dan rincian tugas pokok pegawai

BAB V :HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas hasil dari penelitian tentang faktor –faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dimana penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan uraian pada bab-bab terdahulu memberikan saran-saran sumbangan fikiran pertimbangan dalam bidang pendapatan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Otonomi

Pengertian otonomi menurut Ndraha adalah hak bawaan suatu masyarakat, bukan pemberian pemerintah. Hak adalah bagian integral suatu kedaulatan.

Menurut pasal 1 ayat 5 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintah daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Sumaryadi (2005:48) mengatakan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dan desentralisasi. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Widjaja (2009:76-77) menjelaskan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan dikeluarkan Undang-undang tentang Otonomi Daerah No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam sistem rangka birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbicara mengenai otonomi daerah maka tidak lepas dari adanya konsep dasar bahwa otonomi merupakan bentuk kemandirian mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya semangat otonomi daerah, pemerintah daerah pun semakin terbuka dan leluasa dalam mengembangkan dan memajukan yang ada tanpa harus menunggu kebijakan pusat lagi melalui peraturan-peraturan daerah sesuai kebutuhan masyarakat daerah tersebut, namun dalam pembuatan

kebijakan tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku lebih tinggi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkan kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan, sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas pembantuan.

Menurut Josef (2007:66-70) ada empat Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

1. Manusia pelaksananya harus baik

Merupakan subjek atau pelaku dalam setiap aktivitas pemerintahan sebagai penggerak proses mekanisme dalam pemerintahan harus baik agar tercapai tujuan yang diharapkan. Pengertian ini meliputi:

- a. Mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat.
 - b. Memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Keuangan harus cukup dan baik mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah, antar lain berupa sumber pendapatan,

jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

3. Peralatannya harus cukup dan baik

Setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar kerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien, dan efektif)

4. Organisasi dan manajemennya harus baik

organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai sesuatu tujuan tertentu, sedangkan yang dimaksudkan dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Sumaryadi (2005:64) mengemukakan tujuan pemberian otonomi daerah yang mengemukakan ada 3 hal yang lebih desentralistik yaitu sebagai berikut:

a. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat.

Pembangunan masyarakat identik dengan peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas sosial seperti kesehatan, pendidikan dan sanitasi yang secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Pembangunan masyarakat dapat diartikan sebagai tujuan sosial yang lebih sulit dan sukar diukur seperti keadilan,

pemeretaan, peningkatan kebudayaan kedamaian dan sebagainya. Disini pembangunan ditekankan pada makna community self reliance dan family self reliance.

- c. Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia berbuat. Pembangunan disini merupakan derifasi (penyimpangan) dari paradigma (pedoman)pembangunan yang berpusat pada manusia/rakyat atau people centered development.

2.2 Jenis-Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c. Bea Materai
- d. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas penjualan barang mewah
- e. Bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB)

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak yang di pungut oleh Propinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir

2.3 Pajak Pusat

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak di Negara kita Indonesia ini dibedakan menjadi dua macam, salah satunya ialah pajak negara atau pajak pusat. Pajak Pusat ialah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP/Perpu.

Jenis-jenis Pajak Pusat ialah sebagai berikut :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah UU No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn Bm)

Dasar hukum pengenaan pajak PPN dan PPn Bm adalah UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000.

c. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah UU No. 13 Tahun 1085.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PPB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) adalah UU No. 12 Tahun 1994.

e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000.

2.4Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak (Herry Purwono, 2010: 12) :

a. *Official Asessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Asessment System*

Merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Selain itu wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah wajib pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkawajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksana kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Withholding Tax System

Merupakan sistem pemungutan pajak member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Apabila dicermati dengan seksama, ketiga system ini digunakan secara intergritasi pada sistem pemungutan pajak di Indonesia. *Self assessment system* berlaku ketika wajib pajak melaksanakan administrasi perpajakan yang menjadi kewajibannya (menghitung, memperhitungkan, dan menyetor pajak terutang). Pada saat bersamaan, jika posisi wajib pajak adalah pemungut atau pemotong

karena berkedudukan sebagai pemberi kerja atau pihak yang berwenang memungut pajak, maka *Withholding Tax System* juga digunakan. Sedangkan *Official Assessment System* berlaku ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak atau laporan wajib pajak.

2.5 Pajak Bumi Bangunan

Soemohamidjojo (1998 : 130), dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, memberi definisi pajak, yaitu iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari pendapat di atas terdapat ciri-ciri mendasar tentang pajak sebagai berikut:

- a. Pajak di pungut oleh Negara berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya,
- b. Pajak dipungut tanpa adanya kontraprestasi
- c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan biasanya digunakan untuk investasi
- d. Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara (budgeter) juga berfungsi sebagai pengatur (regulator)

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat (sebagai wajib pajak) kepada kas negara atas jasa yang diberikan pemerintah dan sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang penggunaannya diperuntukan bagi membiayai rumah

tangga pemerintah, Pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunannya.

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1994. Bumi adalah permukaan Bumi dan tubuh bumi yang dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi tekhniki yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Salah satu pajak yang banyak memberikan pemasukan bagi daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan berdasarkan W No. 12 Tahun 1985 jo W No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebgai pungutan daerah atas pemilikan bumi dan bangunan. Ketentuan ini adalah pengganti seluruh jenis pajak Kebendaan dan Kekayaan Harta Benda yang berlaku sebelumnya.

Adapun pengertian Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan W No. 12 Tahun 1994 tersebut adalah :

1. Bumi diartikan dengan permukaan bumi (tanah), perairan dan lautan, sedangkan secar umum tanah dimaksudkan dengan tanah pekarangan, sawah, perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
2. Bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau aliran perairan, termasuk dalam pengertian bangunan yang tepat dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal

(rumah), gedung kantor, hotel, pabrik dan seterusnya (Dirjen pajak, 1993:27)

Jika dicermati pengertian diatas dengan seksama, maka dapat diketahui bahwa seluruh tanah dan bangunan yang berada atau terletak diwilayah Negara indonesia memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku, meski demikian menurut pasal 3 UU No. 12 Tahun 1994 tersebut telah ditetapkan sebagai objek pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan wajib pajak yaitu :

1. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi Bangunan adalah :
 - a) Yang digunakan melayani kepentingan umum dalam bidang tempat ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan yang tidak ditujukan memperoleh keuntungan
 - b) Digunakan untuk kuburan, Peninggalan Purbakala
 - c) Merupakan Hutan Lindung suka Alam
 - d) Untuk Perwakilan Diplomat
 - e) Digunakan oleh Badan atau perwakilan Organisasi Internasional
2. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, sementara pajak nya diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. (Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1994)

Jadi jelaskan tidak semua potensi pajak yang dapat dikenakan pajaknya sebagaimana diatur ketentuan Pasal 3 UU No.12 Tahun 1994 tersebut, sekalipun yang menjadi dari pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara umum adalah :

- a. Bumi yaitu permukaan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
- b. Bangunan yaitu konstruksi teknik yang terpancang/tertanam secara tahap tetap pada tanah/perairan.

Sedangkan subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Soemitro (1990:17) adalah “Orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan pajaknya Bumi dan Bangunan (PBB), maka yang dimaksudkan dengan subjek Pajaknya adalah orang atau badan yang:

- a. Secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan.
- b. Memperoleh manfaat atas bumi.
- c. Memiliki dan menguasai bumi serta,
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan, (Pasal 4 ayat (1) UU No.12 Tahun 1994)

Dengan demikian dapat ditegaskan, subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemilik bumi atau bangunan dalam pengertian UU No.12 Tahun 1994 dan objek adalah bangunan atau benda yang tidak (bergerak, sehingga implikasinya, Pajak Bumi dan Bangunan tergolong pada “Pajak Objektif” karena yang menjadi objeknya benda atau perbuatan (yaitu tanah dan bangunan) sedang subjeknya adalah masyarakat adalah masyarakat atau badan yang memilikinya, tanpa memperhatikan apakah subjeknya tersebut bertempat tinggal di wilayah hukum objek pajak berada atau tidak.

Hal ini senada dengan pendapat Brotodiharjo (1999 : 18) yang menyatakan “Pajak Objektif” adalah pajak yang langsung melihat pada objeknya, yang selain dari pada benda yang dapat pula berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru di cari objeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan subjek pajak yang mempunyai hubungan hukum tersebut, yang tertentu dengan objek pajak itulah yang ditunjuk sebagai subjek pajak untuk membayar pajak.

Berkaitan dengan Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, di Kabupaten Bengkalis sendiri dahulunya memakai UU No 12 Tahun 1985 dan di revisi menjadi tentang UU No 12 Tahun 1994. Walaupun sekarang sudah ada UU terbaru No 28 tahun 2009 yang mana isi nya tentang pajak bumi dan bangunan dimasukan kedalam Pajak Daerah, tetapi di Kabupaten Bengkalis itu sendiri belum menerapkan UU No 28 Tahun 2009 tersebut, karena masih dalam perencanaan atau perundingan.

Sehubungan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar sesuai targetnya, maka kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menghendaki suatu layanan yang baik terhadap masyarakat wajib pajak melalui kerjasama yang seimbang dengan instansi/aparat terkait, karena pelaksanaan penerimaan pajak itu terdiri atas beberapa instansi Pemerintah yang sudah ditunjuk.

Dengan dicermati peraturan Mendagri No.14 Tahun 1984 Tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kelurahan Sebagai Pembina Pemerintahan Desa / Kepala Kelurahan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa, bahwa “kepada Kepala Desa dilimpahkan tugas oleh pejabat tingkat atas (Bupati/Walikota) untuk memungut(bukan menagih) PBB di wilayahnya, tetapi wewenang itu tidak melampaui pemungutan PBB untuk pajak Perkebunan, Kehutanan atau Pertambangan’.

Eksistensi petugas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tinjau dari sistem Administrasi Negara merupakan “Publik Service” dalam artinya melayani kepentingan umum, seperti melayani kepentingan umum, seperti dikatakan Sufian “administrasi Negara” bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengutamakan kebenaran sesuai prosedur yang telah ditentukan sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat banyak” (1999:16)

2.5.1 Cara atau Mekanisme Daftar Pajak Bumi dan Bangunan

Orang atau Badan yang menjadi Subyek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan PBB atau Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau tersebut, dengan membawa syarat seperti surat tanah dan KTP, setelah itu mengisi lembaran formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di Kantor Pelayanan PBB/Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

2.5.2 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan PBB adalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)". NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan :

1. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
2. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya
3. nilai perolehan baru
4. penentuan nilai jual objek pengganti.

2.6 Partisipasi Masyarakat

Ditinjau dari etimologis, bahwa kata partisipasi adalah berasal dari kata participatie (bahasa belanda) yang berarti bagian atau ikut serta. Selamat (2001 : 26) mengemukakan bahwa partisipasi adalah peran serta dalam membangun dapat diartikan sebagai berikut sertanya masyarakat dalam menyusun program pembangun ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan hasil pembangunan yang nyata. Partisipasi adalah peran serta dalam pembangunan, dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam penyusunan program pembangunan, ikut kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut sertanya memanfaatkan hasil.

Partisipasi menurut Surya Diningrat (1992:35) adalah kesedian untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan seseorang.

Sedangkan Seligman dan Edwin dalam Muhammad Ali amin (2003 : 9) menyatakan bahwa “partisipasi adalah ikut sertanya satu kesatuan untuk mengambil dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar”. Partisipasi masyarakat berarti, masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintahan karena kenyataannya, pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara dan membayar utama dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang direncang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. (Pasaribu dan Simanjuntak,2000 : 345).

Berdasarkan berapa konsep teori diatas, jelas bahwa partisipasi dari masyarakat sangatlah diperlukan untuk memberikan pengaruh dalam pembangunan, menurut pendapat S.P. Siagian (2005 : 35), adapun yang dimaksud dengan partisipasi adalah “keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan fisik baik dengan menyumbang uang, fikiran maupun dengan menyumbang tenaga”. Sedangkan Wahyudi kumorotomo (2007:136-138) mengatakan partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1. Partisipasi dalam pemilihan
2. Partisipasi kelompok
3. Kontak antara warga negara dan pemerintahan

Partisipasi warga negara secara langsung dilingkungan pemerintah. Pada hakekatnya partisipasi itu adalah merupakan suatu respon dari masyarakat dalam

setiap pelaksanaan sebuah kebijakan, partisipasi masyarakat tersebut perlu di dorong dengan beraneka ragam pendekatan. Secara umum jenis partisipasi yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat dapat kita lihat seperti:

1. Partisipasi dengan pikiran
2. Partisipasi tenaga
3. Partisipasi dengan keahlian
4. Partisipasi dengan uang

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor perpajakan menjadi optimal, maka perlu diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan. Sesuai uraian diatas penyuluhan merupakan suatu hal yang pokok yang dilaksanakan dalam mencapai suatu program. Penyuluhan dapat dikatakan merupakan salah satu ujung tombak dalam memberhasilkan suatu program. Hal itu sesuai dengan pendapat Mardikanto (1997) bahwa sasaran penyuluhan dimaksudkan untuk mengubah dalam arti agar mereka memiliki dan dapat meningkatkan prilakunya mengenai sikap dan dapat meningkatkan perilakunya mengenai sikap yang lebih progresif, kemampuan yang luas dan keterampilan teknis berusaha.

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan, adapun beberapa faktor-faktor lain yang sangat erat kaitannya. Menurut Kuworotomo partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi 4 macam:

- Partisipasi dalam memilih
- Partisipasi kelompok
- Kontrak antara warga negara dengan pemerintahan
- Partisipasi warga negara secara langsung dilingkungan pemerintah

Ada 5 (lima) unsur penting yang menentukan gagalnya dan berhasilnya partisipasi, yaitu : (Santoso Sastropetro, 1988 : 41)

1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil
2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran
3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan
4. Enthousiasme yang menumbuhkan spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain
5. Adanya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan bersama.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan suatu program namun ada juga sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Faktor-faktor yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar, yaitu : (pangabea 1988:43)

1. Tingkat pendidikan
2. Tingkat pendapatan
3. Jarak tempat tinggal
4. Sikap

5. Penyuluhan

Dalam hal ini penyuluhan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor pajak menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari parat perpajakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal.

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (slamet,1994:97). secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (slamet, 1994:137-143).

Menurut plumer (dalam suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- Pengetahuan dan Keahlian.

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;

- Pekerjaan Masyarakat.

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;

- Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf.

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

- Jenis Kelamin.

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;

2. Faktor-Faktor Eksternal

Menurut sunarti (dalam jurnal tata loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. (<http://2frameit.blogspot.com/2012/08/catatan-tentang-faktor-faktor-yang.html>)

Santoso Sastropetro menjelaskan bahwa ada 5 (lima) hal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu :

1. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, pendidikan sosial dan percaya pada diri sendiri
2. Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap agama
3. Kecenderungan untuk menyalahartikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya terjadi di beberapa negara
4. Kesiadannya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan
5. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan (Santoso Sastropetro, 1988:22)

Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi dalam suatu program juga dapat berasal dari luar / lingkungan. Menurut Holil (1980 : 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal luar/lingkungan, yaitu:

1. komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem luarnya;
2. iklim sosial, politik, ekonomi dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan, serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

2.7 Objek dan Subjek Pajak Bumi Bangunan

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1994 yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan bangunan disini adalah seperti :

1. Jalan Tol
2. Kolam Renang
3. Pagar Mewah
4. Tempat Olahraga
5. Galangan Kapal, dermaga
6. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak

Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang : (UU No 12 Tahun 1994)

1. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
4. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan subjek Pajak Bumi Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan

Undang-undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pajak Bumi Bangunan, maka yang dimaksud dengan subjek pajaknya orang/badan yang:

1. Mempunyai hak atas bumi
2. Memperoleh manfaat atas bumi
3. Memiliki dan menguasai bangunan
4. Memperoleh manfaat atas bangunan

2.8 Definisi Operasional

Guna mendapat persamaan pengertian tentang konsep-konsep dalam penulisan ini serta untuk menghindari kesalahan penafsiran maka penulis merasa perlu mengemukakan konsep-konsep dan memberikan penjelasan tentang indikator-indikatornya:

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.
3. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.
4. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini.

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak.
6. Pajak Bumi dan Bangunan ialah salah satu pajak yang banyak memberikan masukan kepada negara.
7. Kecamatan Mandau adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2007 ; 38).

Adapun konsep operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 : Konsep Operasional

No	Variabel	Indikator
1.	Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan UU No 12 tahun 1994	1. Pendaftaran/ pendataan 2. Pembayaran 3. Sanksi 4. Sosialisai

Sumber : UU No 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Dari tabel diatas dapat dilihat variabel nya yaitu UU No 12 tahun 1994 yang sebagaimana indikatornya yaitu :

1. Pendaftaran/Pendataan

Didalam UU No 12 tahun 1994, dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.

2. Pembayaran

Dalam UU NO 12 Tahun 1994, pajak yang terhitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Dan pajak yang terhutang berdasarkan Surat Keterangan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Apabila pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan.

3. Sanksi

Wajib pajak ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak, maupun pejabat yaitu :

Bagi wajib pajak

- a. Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal ini tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen pajak dan menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan tidak benar. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali pajak yang terhutang.
- b. Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal ini tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen pajak dan menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan tidak benar, memperlihatkan surat palsu tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang.

Bagi Pejabat

Sanksi umum dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, peraturan pemerintah No 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, staatsblad 1860 No 3 tentang peraturan jabatan notaris.

Sanksi khusus dalam hal tidak memperlihatkan surat palsu atau surat palsu tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

4. Sosialisasi

Sebagian masyarakat ada yang belum tahu/memahaminya kegunaan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dari segi manfaat, sistem pembayarannya, dll. Oleh karena itu disinilah peran penting instansi terkait tentang Pajak Bumi dan bangunan untuk memberi sosialisasi penyuluhan supaya masyarakat lebih tahu tentang pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Daerah penelitian adalah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan pertimbangan bahwa kecamatan Mandau perkembangan pembangunan kian pesat, serta meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga dinilai daerah yang cukup berpotensi bagi pengembangan pembangunan dalam menunjang pendapatan daerah. Penelitian ini saya lakukan pada bulan november 2012.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Responden dari penelitian ini adalah Kepala Keluarga yang menjadi wajib pajak. Data yang diperoleh secara langsung dari responden/masyarakat baik melalui observasi, wawancara maupun kuisioner yang diambil sebagai sampel kemudian data ini di analisa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi pemerintahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini data ini berfungsi untuk mempermudah penelitian antara lain data tentang:

a. Lokasi penelitian

- b. Keadaan wilayah penduduk
- c. Keadaan sarana dan prasarana
- d. Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Yaitu teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan yang menjadi objek penelitian penulis. Hasil observasi / pengamatan pada penelitian ini dicatat secara deskriptif, yang secara akurat mengamati dan merekam fenomena yang muncul dan mengetahui hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Data dan informasi tersebut dapat berupa tabel data kuantitatif maupun kualitatif, gambar ilustrasi maupun peta di wilayah penelitian, sebagai bahan analisis dan penjelasan.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Meskipun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, tetapi wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap responden di wilayah penelitian merupakan salah

satu upaya pencarian data untuk mendapatkan informasi tentang pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kecamatan Mandau. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada Pegawai UPTD Dinas Pendapatan Daerah yang terdapat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Pegawai diberikan pertanyaan seputar pendaftaran dan pendataan, pembayaran, sanksi, sosialisasi atau penyuluhan yang diadakan oleh kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

3. Kuesioner (Angket)

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan (angket) yang disusun secara tertulis dan diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban data yang dicari. Merupakan kegiatan untuk menarik informasi dan data dari sampel yang terpilih. Jenis kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner dengan pertanyaan tertutup dimana jawabannya sudah ditentukan, namun terdapat pertanyaan lanjutan apabila jawaban responden tidak terdapat dalam pilihan jawaban. Jadi bagi penganalisis pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner harus benar-benar jelas, pertanyaan harus masuk akal, pertanyaan-pertanyaan dari responden diantisipasi dan susunan pertanyaan direncanakan secara mendetail. Adapun responden yang dituju adalah wajib pajak yang terdapat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, karena wajib pajaklah yang berperan penting dalam pembayaran pajak. Jadi peneliti memberikan daftar pertanyaan (angket) kepada wajib pajak seputar tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005: 80). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di Kecamatan Mandau Kabupaten bengkalis, yaitu sebanyak 50.445 wajib pajak dan Pegawai UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2005: 81). Disini penulis menggunakan rumus Slovin, dimana penempatan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Rumus Slovin itu adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne}$$

Dimana

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

E = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan

Dimana dengan jumlah populasi sebesar 50.445 orang, dan batas ketelitian yang digunakan sebesar 10% maka didapat sampel sebesar :

$$n = \frac{50.445}{1 + 50.445 (0,01)}$$

$$n = \frac{50.445}{504,46}$$

$$n = 100$$

Jadi perhitungan jumlah populasi wajib pajak sebesar 50.445 jiwa dengan jumlah kelonggaran 10% maka dari hasil perhitungan dengan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 99,9 jiwa yang dibulatkan menjadi 100 jiwa. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Disini peneliti melakukan penelitian kesemua lurah atau desa yang ada di Kecamatan Mandau dan peneliti menentukan responden dengan secara acak, dikarenakan beberapa alasan seperti jarak, biaya dan cara ini dilakukan karena sampel dianggap homogen.

Jadi secara keseluruhan sampel penelitian ini berjumlah 100 responden, responden ini lah yang menilai faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

3.5 Teknik Analisis Data

Data akan dikumpulkan melalui observasi atau peninjauan langsung ke Kecamatan Mandau, kemudian melakukan wawancara terhadap responden dan mengajukan kuesioner/angket kepada wajib pajak atau responden. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut akan dikelompokkan kemudian data analisa secara Deskriptif Kualitatif Analisis disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan kemudian diambil suatu kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografi Kecamatan Mandau

Duri adalah ibu kota Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Duri terletak di Kecamatan Mandau, berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatera, sekitar 120 km dari Pekanbaru dalam perjalanan menuju Medan. Duri berbatasan langsung dengan Dumai di utara, Kecamatan Pinggir di selatan, dan Kecamatan Rantau Kopar di barat. Sedangkan letak wilayahnya adalah : 0°56'12" Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara dan 100°56'10" Bujur Timur s/d 101°43'26" Bujur Timur. Dengan luas wilayah 937,47 km² dan jumlah penduduk 256.108 jiwa.

4.1.1. Pemerintahan

Keceamatan mandau dipimpin oleh seorang Camat yaitu : Drs. H. Hasan Basri, M.Si dan Sekretaris Camat Muhammad Fadlul Wajdi, S.STP,M.Si. Secara keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri dari lima belas desa/ kelurahan yang status hukumnya sudah menjadi desa/ kelurahan defenitif. Adapun dari seluruh desa/kelurahan tersebut terdiri dari enam desa yaitu: desa Harapan Baru, Sebangar, Balai Makam, Petani, Kesumbo Ampai, Bumbung dan sembilan kelurahan, yaitu kelurahan, Talang Mandi, Gajah Sakti, Batang Serosa, Balik Alam, Duri Barat , Duri Timur, Pematang Pudu, Air Jamban, dan Babussalam.

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan disuatu desa/kelurahan di Kecamatan Mandau sangat tinggi, terlihat dari jumlah perangkat desa perempuan berjumlah sebanyak 66 orang, dari total keseluruhan jumlah perangkat desa 131 orang, sedangkan 65 orang perangkat desa laki-laki. Menurut klasifikasi desa seluruhnya merupakan desa swadaya. Kecamatan Mandau terdiri dari 721 Rukun tetangga (RT) dan 158 Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 115 RT dan Kelurahan Talang Mandi sebanyak 68 RT.

4.1.2 Ekonomi

Kecamatan Mandau berdasarkan data dari UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebanyak 2 perusahaan besar yang terletak di desa Bumbung dan Kesumbo Ampai. Sementara industri Sedang ada 4 unit, industri kecil 92 unit, dan industri mikro tercatat sebanyak 212 unit.

Dibidang perdagangan tercatat 15 buah swalayan/ supermarket/ toserba/ mini market, 2359 buah toko/ warung kelenteng. Bangunan pasar permanen/ semi permanen ada 7 buah dan pasar tanpa bangunan permanen sebanyak 6 buah. Sedangkan jumlah restoran/ rumah makan tercatat sebanyak 202, warung / kedai makan minum sebanyak 1769 buah, 5 buah penginapan (losmen/ wisma/ motel) dan 7 hotel melati/ berbintang.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Kecamatan Mandau tercatat sebanyak 61 Koperasi Unit Desa dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang,

yang terdiri dari 8 KUD dan 53 koperasi non KUD di Kecamatan Mandau. Jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 229 anggota KUD dan 1731 anggota koperasi non KUD.dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang.

4.1.3. Hasil Bumi

Duri adalah salah satu ladang minyak di Provinsi Riau. Ladang Minyak Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih memproduksi oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri menyumbang sekitar 60% produksi minyak mentah Indonesia, dengan rata-rata produksi saat ini 400.000-500.000 barel per hari.

Minyak mentah yang dihasilkan, meskipun tidak sebaik lapangan minyak Minas, merupakan salah satu minyak dengan kualitas terbaik di dunia, yakni Duri Crude. Pada bulan November 2006, Ladang Minyak Duri atau Duri Steam Flood Field mencapai rekor produksi 2 miliar barel sejak pertama kali dieksplorasi pada 1958. Untuk menunjang produksi ini, di Duri terdapat puluhan perusahaan kontraktor, mulai dari yang besar seperti Schlumberger, Halliburton, dan Tripatra-Fluor, hingga perusahaan kontraktor-kontraktor kecil.

Fakta sebagai penghasil minyak tidak berarti bahwa kota ini adalah kota yang makmur dan maju. Sampai saat ini kota Duri hanya terdiri dari dua jalan utama, yaitu Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Hang Tuah. Di Pokok Jengkol, Jalan Raya Dumai-Pekanbaru yang merupakan bagian dari Jalan Raya Lintas Sumatera bercabang dua. Satu menjadi Jalan Sudirman yang merupakan pusat

kota lama dan satu menjadi Jalan Hang Tuah yang menjadi pusat pertumbuhan baru.

4.1.4. Fasilitas dan Infrastruktur

Di Jalan Sudirman terdapat pasar simpang padang yang bersambung dengan pasar sartika. Di jalan ini juga berdiri sebuah pusat perbelanjaan menengah yang sudah aktif sejak tahun 2008 dan Mandau City. Selain itu terdapat kantor pos dan kantor kecamatan yang dilengkapi dengan gedung pertemuan Bathin Batuah, puskesmas, restoran, dan beberapa toko buku. Jalan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi kota Duri. Menjelang kantor camat, juga ada sebuah tempat pengisian bahan bakar umum.

Jalan Hang Tuah mulai berkembang pada awal tahun 2000 dengan berdirinya secara hampir bersamaan ratusan rumah toko. Jalan ini juga telah diperlebar menjadi 4 jalur dengan pembatas jalan di tengahnya dan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Bank, kantor Telkom, PLN, rumah sakit, dan masjid raya berada di jalan ini. Dua hotel berbintang dua terdapat di jalan ini.

Saat ini, di daerah Balairaja, PT CPI sedang membangun sebuah gedung serbaguna, yakni Gedung Serbaguna Mandau, yang nantinya akan menggantikan gedung Bathin Batuah sebagai tempat konferensi dan berbagai pertemuan formal di Kecamatan Mandau/Pinggir.

4.2. Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

4.2.1. Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

UPTD Pendapatan Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 17 ayat 2 UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Operasional Dinas Pendapatan Daerah Dilapangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 37 ayat 3 UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Dengan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1. Unsur pimpinan adalah kepala daerah
2. Unsur pembantu pimpinan adalah sekretariat
3. Unsur pelaksana adalah bidang.

Susunan organisasi dinas pendapatan daerah, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub bagian perencanaan dan program

2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian administrasi umum
- c. Bidang pendataan dan penetapan, terdiri dari:
1. Seksi pendaftaran dan pendataan
 2. Seksi data dan informasi
 3. Seksi penetapan
- d. Bidang penagihan, terdiri dari:
1. Seksi retribusi
 2. Seksi pembukuan dan verifikasi
 3. Seksi penagihan dan penghitungan
- e. Bidang retribusi dan pendataan lain-lain, terdiri dari:
1. Seksi penerimaan retribusi
 2. Seksi penerimaan pendapatan lain-lain
 3. Seksi inventarisasi dan pembukuan.
- f. Bidang pendapatan pajak dan non pajak, terdiri dari:
1. Seksi pendapatan pajak
 2. Seksi pendapatan non pajak
 3. Seksi pengkajian pendapatan

- g. UPTD
- h. Kelompok jabatan fungsional

Berdasarkan perda diatas, UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan unit pelaksana dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis juga memiliki visi, misi, kedudukan, tugas, dan fungsi yang sama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Adapun visi dan misi, tugas, dan fungsi dinas Pendaptan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah:

Visi : Unggul dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak sumber-sumber pendapatan daerah

Misi : 1. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis.

2. mengelola pelaksanaan pemungutan pajak daerah

3. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemungut pendaptan asli daerah (PAD) dan pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan motto dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah siap menjadi pembayar pajak bukan sekedar menjadi wajib pajak

Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana pelaksanaan dan pemungutan dibidang pendapatan daerah.
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah.
- c. Pelaksanaan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah
- d. Pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP wajib pajak .
- e. Penyampaian SPPT, SKP, SPT, dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh dirjen pajak kepada wajib pajak serta menyampaikan DHPP PBB yang dibuat oleh dirjen pajak kepada pemungut PBB yang ada dibawah pengawasan.
- f. Pengupayaan peningkatan pendapatan asli daerah serta penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru
- g. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

- h. Koordinasi pengawsan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada daerah.
- i. Perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainya serta PBB.
- j. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.

4.2.2. Struktur Organisasi Unit Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

Berikut sususnan organisasi di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang terdiri dari:

- 1. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dipimpin oleh Zulkifli.
- 2. Kepala sub. Bagian tata usaha dijabat oleh Wan Anismah S.H
- 3. Bendahara pembantu penerima dijabat oleh anwar. K
- 4. Koordinator PBB dijabat oleh Wan Anismah, S.H dan dibantu oleh pembimbing PBB Syafrudin.
- 5. Bagian admnistrasi dijabat oleh:
 - 1. Maria Hastuti, S.E
 - 2. Yulizar

3. Kelly fitriyana
 4. Sri rahayu
 5. Dessy susanti
 6. Agustina
 7. Putri wati
6. Petugas pemungut lapangan/harian
1. Sadli, S.Sos.
 2. Khairul Adha, S.E
 3. Syafrizal

4.2.3. Uraian tugas (job description) bagian/unit kerja dinas pendapatan daerah kecamatan mandau

Berikut susunan organisasi dan pembagian tugas (job Description) di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang terdiri dari:

1. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dipimpin oleh Zulkifli. dengan uraian tugas:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kinerja staff
 - b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan menteri keuangan RI kepada daerah

- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis
 - d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Kepala su. Bagian tata usaha dijabat oleh Wan Anismah, S.H. dan dibantu oleh Maria Hastuti, S.E dan kelly fitriana. Dengan uraian tugas :
- a. Membantu kepala UPTD dalam mengelola administrasi umum dan kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diarahkan kepada UPTD
 - b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum pengelola penerimaan daerah pada kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau
 - c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala K.a UPTD
3. Bendahara pembantu penerima dijabat oleh Anwar.K. dengan uraian tugas
- a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada buku penerimaan sejenis dan buku kas umum.
 - c. Menyetorkan semua jenis penerimaan daerah pada kas daerah Kabupaten Bengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan.
 - d. Tugas-tugas lain yang diarahkan Ka. UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

4. Koordinator PBB dijabat oleh Wan Anismah, S.H dan dibantu oleh pembimbing PBB Syafrudin. Dengan uraian tugas:

- a. Membantu tugas administrasi PBB pada kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
- b. Membantu tugas kepala UPTD dan mementau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan.
- c. Tugas lain yang diarahkan Ka. UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

5. Bagian pungut pajak daerah.

1. Sadli, S.Sos

2. Yulizar

3. Sri rahayu

4. Putri wati

5. Khairul Adha, Se dengan uraian tugas:

- a. Membantu bendahara pembantu penerima untuk melakukan pungutan pajak daerah/retribusi daerah (SKPD/SKRD) Gol 2
- b. Tugas-tugas yang diarahkan oleh Ka. UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

6. Bagian pungut pajak daerah.

1. Dessy susanti

2. Syafrizal
3. Agustina dengan uraian tugas:
 - a. Membantu bendahara pembantu penerima untuk melakukan pungutan pajak daerah/retribusi daerah (SKPD/SKRD) Gol 3
 - b. Tugas-tugas yang diarahkan oleh Ka. UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (observasi), dan menyebarkan angket, maka dapat diketahui hasil jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan kepada responden. Dengan demikian diketahuilah penilaian terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau berdasarkan variabel yang dipecahkan menjadi angket, variabel tersebut ialah :

5.1.1 Pendaftaran atau Pendataan

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada petugas dalam hal ini kepada UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. Pendaftaran dan pendataan diukur berdasarkan penilaian wajib pajak (responden) terhadap kemampuan kantor UPTD Pendapatan daerah yang berkaitan dengan tempatnya wajib pajak mendaftarkan objek pajaknya.

Untuk mengetahui lebih jelasnya tanggapan responden tentang sudah baik atau belum Pendaftaran dan Pendataan PBB di Kecamatan Mandau dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Tanggapan responden tentang sudah baik atau belum Pendaftaran dan Pendataan PBB di Kecamatan Mandau

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	5
2	Baik	37	37
3	Kurang Baik	51	51
4	Tidak Baik	7	7
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden mengatakan kurang baik tentang pendaftaran dan pendataan PBB di Kecamatan Mandau sebesar 53 orang atau 53% dari 100 orang atau 100% responden dan yang menjawab tidak baik 7 orang atau 7%. Mayoritas responden menjawab kurang baik karena petugas belum optimal dalam melakukan pendaftaran dan pendataan seperti lamanya selesai SPPT yang diberi pihak UPTD kepada wajib pajak. Kemudian masyarakat yang menjawab baik sebanyak 37 orang dan sangat baik sebanyak 5 orang, karena tidak berbelit-belitnya pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan “kalau masalahnya lama nya selesai SPPT itu karena kami menyerahkan berkas atau lembaran SPOP ke KPP Pratama yang ada di Dumai satu kali dalam sebulan dikarenakan ongkos ke dumai yang besar. Kalau wajib pajak ingin cepat selesai SPPTnya, wajib pajak itu sendiri bisa mengantarkannya ke KPP Pratama Dumai. ” (Hasil Wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden dalam pengumpulan dan penyusunan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Tanggapan responden dalam pengumpulan dan penyusunan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	5
2	Baik	32	32
3	Kurang Baik	54	54
4	Tidak Baik	9	9
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden mengatakan kurang baik dalam pengumpulan dan penyusunan subjek dan objek pajak bumi bangunan di UPTD sebesar 54 atau 54% dari 100 orang atau 100%, responden menjawab kurang baik karena petugas UPTD tidak melakukan pengumpulan dan penyusunan data subjek dan objek pajak dengan baik, seperti sering tidak ditemukannya data wajib pajak yang telah kehilangan SPPT. Dan diikuti dengan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 9 orang. Kemudian dilanjutkan dengan yang menjawab sangat baik sebanyak 5 orang dan baik sebanyak 32 orang.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“apabila wajib pajak datang ke kami melaporkan SPPT nya hilang, kami akan coba mencari datanya STTS, kalau tidak ada juga masyarakat harus mendaftar kembali,karena di kantor ini masih memakai sistem manual, belum menggunakan penyimpanan data di komputer”* (Hasil Wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden tentang ditindak lanjutinya wajib pajak yang tidak mendaftarkan objek nya ke UPTD dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Tanggapan responden tentang ditindak lanjutnya wajib pajak wajib pajak yang tidak mendaftarkan objek pajaknya ke UPTD

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	8	8
2	Baik	33	33
3	Kurang Baik	49	49
4	Tidak Baik	10	10
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden mengatakan kurang baik penindak lanjutnya wajib pajak yang tidak mendaftarkan objek pajaknya ke UPTD sebanyak 49 responden dari 100 responden, disini responden menjawab kurang baik karena petugas UPTD hanya diam saja bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan objek pajaknya, dan diikuti dengan 10 responden yang menjawab tidak baik. Kemudian dilanjutkan dengan responden yang menjawab sangat baik sebanyak 8 orang dan baik sebanyak 33 orang.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“kami memang tidak menindak lanjuti wajib pajak yang tidak mendaftarkan objek pajaknya, karena itu kesadaran masyarakat itu sendiri, karena wajib pajak itu sendiri yang akan mengalami kerugiannya seperti wajib pajak yang akan menjual tanahnya, sipembeli pasti akan meminta bukti lunas pembayaran PBB nya.”* (Hasil Wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden tentang pengukuran objek pajak yang dilakukan oleh UPTD dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.4 : Tanggapan responden tentang pengukuran objek yang dilakukan oleh UPTD

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	14	14
2	Baik	32	32
3	Kurang Baik	48	48
4	Tidak Baik	6	6
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden menjawab kurang baik pengukuran objek pajak yang dilakukan oleh UPTD sebanyak 48 orang atau 48 % dari 100 orang (responden), karena disini pegawai UPTD tidak terjun langsung kelapangan untuk mengukur objek pajak tersebut, pegawai UPTD hanya sekedar menanya kondisi tanah atau bangunan yang didaftarkan oleh wajib pajak. Dan diikuti dengan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 6 orang. Kemudian dilanjutkan dengan responden yang menjawab sangat baik sebanyak 5 responden dan baik sebanyak 32 orang.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“kalau masalah pengukuran objek pajak, kami memang tidak terjun langsung kelapangan, kami hanya sekedar menanya ke wajib pajak letak dan kondisi tanah dan bangunannya, dan mengikuti panduan yang ada disurat tanah dan lembaran SPOP yang diisi oleh wajib pajak.”* (Hasil Wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden tentang prosedur dalam hal pendaftaran dan pendataan yang telah diterapkan oleh pemerintah dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.5 : Tanggapan responden tentang prosedur pendaftaran dan pendataan yang telah diterapkan oleh pemerintah

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	5
2	Baik	43	43
3	Kurang Baik	40	40
4	Tidak Baik	12	12
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden menjawab baik tentang prosedur dalam hal pendaftaran dan pendataan yang telah diterapkan oleh pemerintah sebanyak 43 orang dari 100 responden, karena disini dalam hal pendaftaran yang dialami wajib pajak tidak berbelit-belit dan tidak rumit. Dan diikuti dengan sangat baik sebanyak 5 orang. Kemudian dilanjutkan dengan kurang baik sebanyak 40 orang dan tidak baik sebanyak 12 orang.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“Prosedur dalam pendaftaran Objek Pajak PBB sangatlah mudah, begitu wajib pajak datang kami layanidan langsung menghadap kepada saya,dan wajib pajak cukup membawa surat tanah dan mengisi lembaran SPOP yang kami berikan”* (Hasil Wawancara)

Untuk mengetahui rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan yang penulis berikan kepada responden, dapat kita lihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.6 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

No	Pertanyaan	SB/SS	B/S	KB/KS	TB/TS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	pendaftaran dan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, apakah sudah terlaksana dengan baik?	5	37	51	7	100
	Persentase (%)	5	37	51	7	100
2.	Upaya UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dalam pengumpulan dan penyusunan mengenai subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kecamatan Mandau apakah sudah terlaksana dengan baik?	5	32	54	9	100
	Persentase (%)	5	32	54	9	100
3.	wajib pajak Bumi dan Bangunan yang tidak mendaftarkan objek pajaknya di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sudah di tindak lanjuti dengan baik?	8	33	49	10	100
	Persentase (%)	8	33	49	10	100

1	2	3	4	5	6	7
4.	Kegiatan pengukuran Objek pajak yang di lakukan UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sudah terlaksana dengan baik?	14	32	48	6	100
	Persentase (%)	14	32	48	6	100
5.	Apakah prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam hal pendaftaran dan pendataan dapat berjalan dengan baik?	5	43	40	12	100
	Persentase (%)	5	43	40	12	100
	Jumlah / Jumlah Rata-Rata	37/7	177/35	242/49	44/9	500/100
	Persentase (%)	7	35	49	9	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat di lihat bahwa pada masing-masing pertanyaan yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk tanggapan responden mengenai *Pendaftaran dan Pendataan* mayoritas tanggapan responden mengatakan *kurang baik* sebanyak 49 orang atau 49%. Yaitu dalam pendaftaran dan pendataan PBB di kantor UPTD belum optimal sepenuhnya baik, misalnya dari segi pengumpulan dan penyusunan data subjek dan objek pajak, dan ada juga responden mengatakan *tidak baik* sebesar 9 orang atau 9%. Selanjutnya diikuti dengan responden yang menjawab baik sebanyak 35%, yang mana prosedur yang diterapkan pemerintah dalam pendaftaran objek pajak berjalan dengan baik, sedangkan responden yang menjawab sangat baik sebanyak 7%.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“Prosedur dalam pendaftaran Objek Pajak PBB sangatlah mudah, begitu wajib pajak datang kami layanidan langsung menghadap kepada saya,dan wajib pajak cukup membawa surat tanah dan mengisi lembaran SPOP yang kami berikan”* (Hasil Wawancara)

5.1.2 Pembayaran

Setelah wajib pajak mendaftarkan objek pajaknya ke UPTD Pendapatan Daerah, maka kewajiban wajib pajak selanjutnya ialah membayar objek pajaknya ke tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan seperti di Bank dan Kantor Pos. Di Kecamatan Mandau sendiri tempat yang telah ditentukan yaitu Teller Bank Riau yang ada di UPTD. Pembayaran diukur berdasarkan penilaian wajib pajak (responden) terhadap kemampuan Kantor UPTD Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan tempat wajib pajak membayar objek pajak nya.

Untuk mengetahui lebih jelasnya tanggapan responden tentang pelayanan dalam pemabayaran PBB di UPTD dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.7 : Tanggapan responden tentang pelayanan dalam pembayaran PBB di UPTD

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	5
2	Baik	58	58
3	Kurang Baik	32	32
4	Tidak Baik	5	5
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas bahwa mayoritas responden menjawab baik tentang pelayanan dalam pembayaran PBB di UPTD sebanyak 58 responden dari 100

responden, itu dikarenakan pelayan yang diberikan oleh pegawai UPTD kepada wajib pajak yang membayar dilayani dengan ramah dan sopan. Dan diikuti dengan responden yang menjawab sangat baik sebanyak 5 responden. Kemudian dilanjutkan dengan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 32 orang dan tidak baik sebanyak 5 orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah seorang pegawai UPTD mengatakan bahwa *“pelayanan kami berikan yang terbaik untuk wajib pajak, yaitu dengan ramah tamah, sopan, dan tidak berbelit-belit. Sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak.”* (hasil wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden tentang pemberian SPPT oleh pihak UPTD dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.8 : Tanggapan responden tentang pemberian SPPT oleh pihak UPTD

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	6	6
2	Baik	40	40
3	Kurang Baik	46	46
4	Tidak Baik	8	8
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab tidak baik tentang pemberian SPPT oleh pihak UPTD sebanyak 46 orang dari 100 responden, dikarenakan banyaknya SPPT yang tidak sampai ketangan wajib pajak, jadi masyarakat lupa dan malas untuk membayar pajak. Dan diikuti dengan yang menjawab tidak baik sebanyak 8 orang. Kemudian dilanjutkan dengan

responden yang menjawab baik sebanyak 40 orang dan yang paling sedikit menjawab sangat baik sebanyak 6 orang.

Menurut Wan Anismah yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai kordinator PBB “*kalau dalam pemberian SPPT itu tugas pihak kelurahan bagian PBB yang diutus dari kecamatan, kalau kami disini Cuma perpanjang tangannya saja. Menurut saya SPPT yang tidak sampai ke tangan wajib mungkin dikarenakan nama jalan yang berubah atau alamat wajib pajak yang berubah karena perkembangan suatu daerah tersebut.*” (Hasil Wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden tentang penyelesaian hambatan yang dialami oleh Pegawai UPTD pada saat wajib pajak melakukan pembayaran dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel V.9 : Tanggapan responden tentang penyelesaian hambatan yang dialami oleh Pegawai UPTD pada saat wajib pajak melakukan pembayaran

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	6	6
2	Baik	45	45
3	Kurang Baik	44	44
4	Tidak Baik	5	5
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden menjawab baik tentang penyelesaian hambatan yang dialami oleh Pegawai UPTD pada saat wajib pajak melakukan pembayaran sebanyak 45 orang dari 100 responden, karena disini petugas bisa menyelesaikan semua hambatan yang dialaminya, seperti mencari STTS wajib pajak yang masih pakai sistem manual. Dan diikuti dengan wajib pajak yang menjawab sangat baik sebanyak 6 responden. Kemudian dilanjutkan

dengan wajib pajak yang menjawab kurang baik sebanyak 44 orang dan tidak baik sebanyak 5 orang.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“selama ini segala hambatan yang kami alami tentang pembayaran PBB masih bisa kami selesaikan”* (Hasil Wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden tentang prosedur dalam pembayaran PBB yang dapat dimengerti wajib pajak dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

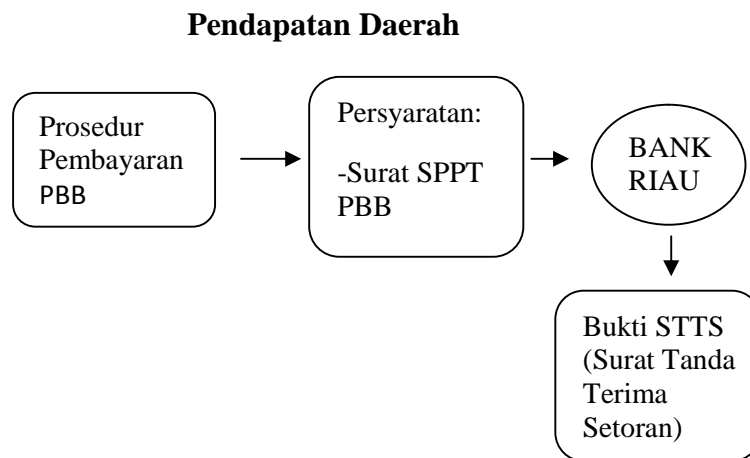
Tabel V.10 :Tanggapan responden tentang prosedur dalam pembayaran PBB yang dapat dimengerti wajib pajak

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	3	3
2	Baik	49	49
3	Kurang Baik	39	39
4	Tidak Baik	9	9
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab baik dalam prosedur pembayaran PBB sebanyak 49 responden dari 100 responden, karena dalam pembayaran yang dialami oleh wajib pajak tidak berbelit-belit dan tidak memakan waktu yang lama. Diikuti dengan responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 responden. Kemudian dilanjutkan dengan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 39 responden dan tidak baik sebanyak 9 responden.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“Dalam pembayaran PBB tidaklah berbelit-belit, wajib pajak cukup membawa dan melihatkan SPOP nya kepada kami.”* (Hasil Wawancara)

Gambar 1 : Rangkaian Proses pembayaran pajak PBB di Kantor UPTD

Sumber: UPTD Pendapatan daerah Kec. Mandau

Selanjutnya tanggapan responden tentang prosedur dalam hal pembayaran yang telah diterapkan oleh pemerintah dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.11 :Tanggapan responden tentang prosedur pembayaran yang telah diterapkan oleh pemerintah

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	2
2	Baik	45	45
3	Kurang Baik	36	36
4	Tidak Baik	17	17
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden menjawab baik tentang prosedur pembayaran yang diterapkan oleh pemerintah sebanyak 45 responden dari 100 responden, karena prosedur dalam pembayaran yang diterapkan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan dengan ketentuan yang berlaku. Dan diikuti dengan responden yang menjawab sangat baik sebanyak 2 responden. Kemudian

dilanjuti dengan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 36 responden dan tidak baik sebanyak 17 responden.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“selama ini segala hambatan yang kami alami tentang pembayaran PBB masih bisa kami selesaikan dan kami disini bekerja sesuai seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.”* (Hasil Wawancara)

Untuk mengetahui rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan yang penulis berikan kepada masyarakat atau responden, dapat kita lihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel V.12 : Rekapitulasi tanggapan Responden Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

No	Pertanyaan	SB/SS	B/S	KB/KS	TB/TS	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bagaimana dalam pelayanan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau?	5	58	32	5	100
	Persentase (%)	5	58	32	5	100
2.	Bagaimana dalam pemberian SPPT oleh pihak UPTD Pendapatan Daerah?	6	40	46	8	100
	Persentase (%)	6	40	46	8	100
3.	Hambatan dialami oleh pegawai UPTD Pendapatan Daerah pada saat wajib pajak melakukan pembayaran dapat diselesaikan dengan baik?	6	45	44	5	100

	Persentase (%)	6	45	44	5	100
1	2	3	4	5	6	7
4.	Apakah prosedur dalam pembayaran, wajib pajak dapat ngerti dengan baik?	3	49	39	9	100
	Persentase (%)	3	49	39	9	100
5.	Apakah prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan dengan baik?	2	45	36	17	100
	Persentase (%)	2	45	36	17	100
	Jumlah / Jumlah Rata-Rata	22/5	237/47	197/39	44/9	500/100
	Persentase (%)	5	47	39	9	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-masing pertanyaan yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden mengenai *pembayaran* mayoritas tanggapan responden mengatakan *baik* sebesar 47 responden atau 47%. Yaitu dalam pembayaran PBB telah dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak berbelit-belit, dan ada juga juga responden mengatakan sangat baik sebanyak 5%. Kemudian responden yang menjawab kurang baik sebanyak 39 responden atau 39%. Yaitu masih banyaknya tidak tersampaikan SPPT kepada masyarakat, jadi masyarakat malas untuk membayar pajak. Dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 9 responden atau 9%.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“salah satu penyebab rendahnya penerimaan PBB yaitu tidak tersampainya SPPT kepada wajib pajak, ini terjadi karena perkembangan daerah yang mana RT yang semakin bertambah dan nama jalan tempat wajib pajak berdomisili yang telah berubah dan bisa juga dari pembuatan SPPT yang dibuat oleh KPP Pratama Dumai.”* (hasil wawancara)

5.1.3 Sanksi

Sanksi juga termasuk salah satu faktor upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penegakan sanksi merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap masyarakat, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan pengetatan sanksi sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu guna mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pemberian sanksi oleh UPTD kepada wajib pajak yang menyampaikan SPOP tidak benar dapat dilihat dari berikut ini :

Tabel V.13 :Tanggapan responden tentang pemberian sanksi oleh UPTD kepada wajib pajak yang menyampaikan SPOP tidak benar

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	7	7
2	Baik	58	58
3	Kurang Baik	28	28
4	Tidak Baik	7	7
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden menjawab baik tentang pemberian sanksi oleh UPTD kepada wajib pajak yang menyampaikan SPOP tidak benar sebanyak 58 responden dari 100 responden, dan diikuti dengan sangat baik sebanyak 7 responden. Kemudian dilanjutkan dengan responden menjawab kurang baik sebanyak 28 responden dan tidak baik sebanyak 7 responden.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“Apabila kami menemukan wajib pajak yang mempalsukan SPOP atau mempalsukan data maka kami tidak akan melayaninya, tetapi selama ini kami belum menemukan seperti itu. Karena itu kesalahan yang berat, mungkin bisa dipidana.”* (hasil wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden tentang pemberian sanksi yang diberikan oleh UPTD kepada wajib pajak yang mempalsukan data dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.14 :Tanggapan responden tentang pemberian sanksi yang diberikan oleh UPTD kepada wajib pajak yang mempalsukan data

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	12	12
2	Baik	44	44
3	Kurang Baik	35	35
4	Tidak Baik	9	9
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden menjawab baik tentang pemberian sanksi yang diberikan oleh UPTD kepada wajib pajak yang mempalsukan data sebanyak 44 responden dan diikuti dengan sangat baik sebanyak 12 responden. Kemudian dilanjutkan dengan responden menjawab kurang

baik sebanyak 35 responden dan paling sedikit menjawab tidak baik sebanyak 9 responden.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“Apabila kami menemukan wajib pajak yang mempalsukan SPOPatau mempalsukan data maka kami tidak akan melayaninya, tetapi selama ini kami belum menemukan seperti itu. Karena itu kesalahan yang berat, mungkin bisa dipidana.”* (hasil wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden tentang prosedur yang diterapkan Pemerintah dalam hal sanksi pajak dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel V.15 :Tanggapan responden tentang prosedur yang diterapkan Pemerintah dalam hal sanksi pajak

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	20	20
2	Baik	26	26
3	Kurang Baik	50	50
4	Tidak Baik	4	4
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas mayoritas responden menjawab kurang baik tentang prosedur yang diterapkan Pemerintah dalam hal sanksi pajak sebanyak 50 responden, karena dari sanksi yang dibuat pemerintah masih banyak yang tidak dijalani oleh wajib pajak. Dan diikuti oleh tidak baik sebanyak 4 responden. Kemudian dilanjutkan dengan wajib pajak yang menjawab baik sebanyak 26 responden dan sangat baik sebanyak 20 responden.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“kalau dalam Undang-Undang tentang PBB, begitu jelas sanksi-sanksi yang diberikan kepada wajib pajak atau petugas pajak yang bersalah, seperti didenda atau dipidana, tetapi kalau disini kami memberi sanksi masih berupa denda, itu pun diberikan kepada wajib pajak yang telat bayar. Kalau pidana belum pernah terjadi.”* (hasil wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden tentang wajib pajak yang menjalani sanksi dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.16 : Tanggapan responden tentang wajib pajak yang menjalani sanksi

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	6	6
2	Baik	59	59
3	Kurang Baik	26	26
4	Tidak Baik	9	9
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Tabel diatas mayoritas menjawab baik tentang wajib pajak yang menjalani sanksi sebanyak 59 responden, hal ini terlihat seperti pemberian denda yang diberikan petugas kepada wajib pajak yang telat bayar. Lalu diikuti dengan wajib pajak yang menjawab sangat baik sebanyak 6 responden. Kemudian dilanjutkan dengan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 26 responden dan tidak baik sebanyak 9 responden.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“pemberian sanksi seperti denda kepada wajib pajak yang telat bayar selalu kami berikan dan selama ini wajib pajak menjalaninya, karena kami akan memberikan STTS kepada wajib pajak yang telah melunasi segala hutang atau kewajibannya.”* (hasil wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden tentang sanksi yang diberikan oleh UPTD dengan rasa adil dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.17 : Tanggapan responden tentang tentang sanksi yang diberikan oleh UPTD dengan rasa adil

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	13	13
2	Setuju	34	34
3	Kurang Setuju	47	47
4	Tidak Setuju	6	6
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden menjawab kurang setuju tentang sanksi yang diberikan oleh UPTD dengan rasa adil sebanyak 47 responden dan diikuti dengan responden menjawab tidak setuju sebanyak 6 responden. Kemudian dilanjutkan dengan menjawab sangat setuju sebanyak 13 responden dan menjawab setuju sebanyak 34 responden.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“Dalam pemberian sanksi, kami disini tidak membedakan-bedakannya, baik itu keluarga, petugas disini atau pun wajib pajak biasa. Yang salah tetap diberi sanksi.”* (hasil wawancara)

Menurut hasil peninjauan langsung (observasi) penulis ke kantor UPTD Pendapatan daerah Kecamatan Mandau dalam pemberian sanksi memang tidak dibeda-bedakan antara wajib pajakyang satu dengan yang lainnya, yaitu sanksi yang merata bagi setiap kalangan.

Untuk mengetahui hasil rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan yang penulis berikan kepada responden dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.18 : Rekapitulasi tanggapan Responden Tentang Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

No	Pertanyaan	SB/SS	B/S	KB/KS	TB/TS	Jumlah
1.	Bagaimana dengan pemberian sanksi oleh UPTD Pendapatan Daerah tentang menyampaikan SPOP yang tidak benar?	7	58	28	7	100
	Persentase (%)	9	58	28	7	100
2.	Bagaimana dengan pemberian sanksi oleh UPTD Pendapatan Daerah tentang wajib pajak yang mempalsukan data?	12	44	35	9	100
	Persentase (%)	12	44	35	9	100
3.	Apakah prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam hal sanksi PBB dapat berjalan dengan baik?	20	26	50	4	100
	Persentase (%)	20	26	50	4	100
4.	Apakah sanksi yang telah dibuat,wajib pajak dapat menjalaninya dengan baik?	6	59	26	9	100
	Persentase (%)	6	59	26	9	100
5.	Apakah Bapak/Ibu setuju selama ini sanksi yang diberikan oleh UPTD Pendapatan Daerah kepada wajib pajak dengan rasa adil?	13	34	47	6	100
	Persentase (%)	13	34	47	6	100
	Jumlah / Jumlah Rata-Rata	58/12	221/44	186/37	35/7	500/100
	Persentase (%)	12	44	37	7	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-masing pertanyaan yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden mengenai *sanksi* mayoritas tanggapan responden mengatakan *baik* sebanyak 44%. Yaitu sanksi yang diberikan petugas kepada wajib pajak dengan tidak membeda-bedakannya antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya dan wajib pajak menjalani sanksi tersebut dengan baik. Dan ada juga responden yang menjawab kurang baik sebanyak 37%, yaitu sanksi yang diberikan petugas berupa denda saja belum sepenuhnya membuat wajib pajak jera. Masih banyaknya wajib pajak yang mengabaikan denda tersebut.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“Dalam pemberian sanksi, kami disini tidak membeda-bedakannya, baik itu keluarga, petugas disini atau pun wajib pajak biasa. Yang salah tetap diberi sanksi.”* (hasil wawancara)

5.1.4 Sosialisasi/Penyuluhan

Penyuluhan/sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor rangsangan bagi responden atau wajib pajak dalam partisipasi dan disiplin membayar Pajak Bumi dan Bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar, pengalaman dan pengetahuan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB akan meningkat.

Selanjutnya tanggapan responden tentang pemberian sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh UPTD kepada wajib pajak dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.19 : Tanggapan responden tentang pemberian sosialisasi PBB yang dilakukan oleh UPTD kepada wajib pajak

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	15	15
2	Baik	49	49
3	Kurang Baik	32	32
4	Tidak Baik	4	4
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab baik tentang pemberian sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh UPTD kepada wajib pajak sebanyak 49 responden. Disini petugas pajak menjelaskan dengan rinci kepada wajib pajak tentang jumlah pajak yang dikenakan ke wajib pajak ataupun perubahan jumlah pajak, dan diikuti dengan sangat baik sebanyak 15 responden. Kemudian dilanjutkan dengan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 32 responden dan paling sedikit menjawab tidak baik sebanyak 4 responden, alasannya tidak kesemua wajib pajak menjelaskan rincian pajak yang dikenakan kepada wajib pajak.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“jumlah pajak yang dikenakan ke masyarakat akan kami jelaskan kalau wajib pajak tersebut minta dijelasin, kadang ada wajib pajak yang tidak menerima dengan dikenakan pajak yang telah ditentukan.”* (hasil wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden tentang sosialisasi PPB melalui spanduk atau baliho, telah mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel V.20 : Tanggapan responden tentang sosialisasi PPB melalui spanduk atau baliho, telah mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	7	7
2	Setuju	41	41
3	Kurang Setuju	43	43
4	Tidak Setuju	9	9
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden menjawab kurang setuju tentang sosialisasi PPB melalui spanduk atau baliho, telah mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak sebanyak 43 responden, yaitu kebanyakan masyarakat disini banyak mengabaikan spanduk atau baliho, karena kebanyakan masyarakat baliho hanya untuk sekedar dibaca bukan untuk dipahami. diikuti dengan responden menjawab tidak setuju sebanyak 9 responden. Kemudian dilanjutkan dengan responden menjawab setuju sebanyak 41 responden dan paling sedikit yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden, alasannya karena spanduk dan baliho hanya untuk sekedar mengingatkan wajib pajak yang sadar akan untuk untuk membayar pajaknya.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“setiap tahunnya, menjelang september kami memasang spanduk atau baliho, sekedar untuk mengingatkan wajib pajak untuk membayar PBB.”* (hasil wawancara)

Menurut hasil observasi penulis spanduk atau baliho hanya untuk sekedar mengingatkan wajib pajak yang rutin atau yang sadar akan kewajibannya membayar pajak. Banyak masyarakat yang mengabaikan tujuan dari tulisan

spanduk tersebut. Oleh karena spanduk dan baliho tidak mampu/efektif untuk menyadarkan wajib pajak untuk mendaftarkan atau membayar objek pajaknya.

Selanjutnya tanggapan responden tentang prosedur yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal sosialisasi/penyuluhan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.21 : Tanggapan responden tentang prosedur yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal sosialisasi/penyuluhan

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	7	7
2	Baik	58	58
3	Kurang Baik	29	29
4	Tidak Baik	6	6
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas mayoritas responden menjawab baik tentang prosedur yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal sosialisasi/penyuluhan sebanyak 58 responden, dan diikuti oleh responden yang menjawab sangat baik sebanyak 7 responden, kemudian dilanjutkan dengan responden menjawab kurang baik sebanyak 29 responden dan tidak baik sebanyak 6 responden.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan “*sekarang cara bersosialisasi yang dilakukan pemerintah beragam-ragam caranya, seperti dimedia elektronik (televisi dan radio) dan media masa (koran).*” (hasil wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden dalam bersosialisasi pegawai mampu meyakinkan wajib pajak dapat dilihat tabel berikut :

Tabel V.22 : Tanggapan responden dalam bersosialisasi pegawai mampu meyakinkan wajib pajak

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Mampu	9	6
2	Mampu	45	45
3	Kurang Mampu	37	37
4	Tidak Mampu	9	9
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden menjawab Mampu dalam bersosialisasi pegawai mampu meyakinkan wajib pajak sebanyak 45 responden, karena disini petugas mampu meyakinkan wajib pajak dalam penetapan tarif pajak yang diberikan kepada wajib pajak. Dan diikuti dengan responden yang menjawab sangat mampu sebanyak 9 responden, kemudian dilanjutkan dengan wajib pajak yang menjawab kurang mampu sebanyak 37 responden dan tidak mampu sebanyak 9 responden.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan *“Selama ini kalau ada masyarakat menanya tentang objek pajaknya atau tentang PBB masih bisa kami atasi, dan apalagi sekarang masyarakat sudah cerdas, jadi menjalasannya tidak terlalu susah.”* (hasil wawancara)

Selanjutnya tanggapan responden tentang pengetahuan yang dimiliki pegawai dalam menjawab pertanyaan dan keluhan masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.23 : Tanggapan responden tentang pengetahuan yang dimiliki pegawai dalam menjawab pertanyaan dan keluhan masyarakat

No	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	7	7
2	Baik	54	54
3	Kurang Baik	33	33
4	Tidak Baik	6	6
Jumlah		100	100

Sumber : Data Olahan 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden menjawab baik tentang pengetahuan yang dimiliki pegawai dalam menjawab pertanyaan dan keluhan masyarakat sebanyak 54 responden, yaitu apapun yang ditanya wajib pajak tentang PBB petugas mampu untuk menjawab dan meyakinkan masyarakat. Dan diikuti dengan responden menjawab sangat tidak baik sebanyak 7 responden. Kemudian dilanjutkan dengan kurang baik sebanyak 33 responden dan diikuti dengan tidak baik sebanyak 6 responden.

Menurut Bapak Syafrudin yaitu salah satu pegawai UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang bertugas sebagai pembimbing PBB mengatakan “Selama ini kalau ada masyarakat menanya tentang objek pajaknya atau tentang PBB masih bisa kami atasi, dan apalagi sekarang masyarakat sudah cerdas, jadi menjalasanya tidak terlalu susah.” (hasil wawancara)

Untuk mengetahui hasil rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan atau questioner yang penulis berikan kepada responden dapat kita lihat dari tabel berikut :

Tabel V.24 : Rekapitulasi tanggapan Responden Tentang Sosialisasi/Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

No	Pertanyaan	SB/SS	B/S	KB/KS	TB/TS	Jumlah
1.	Pemberian sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh UPTD kepada wajib pajak?	15	49	32	4	100
	Persentase (%)	15	49	32	4	100
2.	Sosialisasi PPB melalui spanduk atau baliho, telah mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak?	7	41	43	9	100
	Persentase (%)	7	41	43	9	100
3.	Prosedur yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal sosialisasi/penyuluhan?	7	58	29	6	100
	Persentase (%)	7	58	29	6	100
4.	Dalam bersosialisasi pegawai mampu meyakinkan wajib pajak?	9	45	37	9	100
	Persentase (%)	9	45	37	9	100
5.	Pengetahuan yang dimiliki pegawai dalam menjawab pertanyaan dan keluhan masyarakat?	7	54	33	6	100
	Persentase (%)	7	54	33	6	100
	Jumlah / Jumlah Rata-Rata	45/9	247/49	174/35	34/7	500/100
	Persentase (%)	7	49	35	7	100

Sumber : data olahan 2013

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pada masing-masing pertanyaan yang penulis ajukan sebagai bahan angket untuk mengetahui tanggapan responden tentang Penyuluhan/Sosialisasi mayoritas responden

menjawab baik sebesar 49%, yaitu pengetahuan yang dimiliki pegawai UPTD mampu menjawab segala keluhan yang dialami masyarakat, tetapi Pegawai UPTD belum mampu untuk mengajak wajib pajak untuk membayar pajak nya, hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak tersebut. Dan ada juga responden yang menjawab kurang baik sebanyak 35%, yaitu sosialisasi melalui spanduk dan baliho belum mampu untuk mengajak wajib pajak untuk membayar pajak, buktinya masih banyak wajib pajak yang mengabaikan spanduk/baliho yang dipajang oleh pegawai UPTD.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sudah baik, namun dalam penerapan dilapangan masih belum sesuai dengan yang diterapkan oleh UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

Berpedoman pada hasil tabel-tabel frekwensi dan uraian yang telah dituangkan diatas, maka dapat digeneralisasikan atau disimpulkan bahwa pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sudah baik untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Mandau.

Tentunya tuntutan ini perlu diperhatikan dengan serius, karena bagaimanapun dengan berbagai sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Hal ini dimungkinkan karena Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemungutan daerah.

UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, sehingga aturan yang digunakan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 adalah Pendaftaran dan Pendataan, Pembayaran, sanksi dan Sosialisasi/Penyuluhan.

Dengan demikian rangkaian mekanisme kerja yang harus dioptimalkan pihak intern UPTD sebagai kebijaksanaan yang diambil dalam peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau yang meliputi Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan supaya seluruh potensi wajib pajak yang ada dapat tergali, sehingga menambah pemasukan jumlah pajak yang akan dipungut tentunya melalui penetapan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

5.2 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pengelolaan pajak harus maksimal dan yang lebih utama adalah upaya peningkatan penerimaan pajak. Ada pun salah satu objek pajak daerah yang dikelola oleh UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau adalah Pajak Bumi

dan Bangunan, hal ini penting artinya mengingat semakin pembangunan yang ada di kota duri terus meningkat.

UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, sehingga aturan yang digunakan dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan adalah masih memakai Undang-Undang No 12 Tahun 1985. Walaupun demikian UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Upaya yang dilakukan UPTD pendapatan daerah Kecamatan Mandau dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pelayanan dalam arti menerima si wajib pajak dengan ramah dan sopan, tidak berbelit-belit dalam proses pendaftaran dan pembayaran pajak, di proses dengan cepat sehingga tidak menyita waktu si wajib pajak.
2. Memberi sanksi kepada wajib pajak yang telat bayar dan kurang bayar, sampai sejauh ini sanksi yang telah diterapkan berupa sanksi administrasi sebesar 2% dari pajak yang harus dibayarkan kepada pihak UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
3. Memberikan hadiah setiap tahunnya kepada wajib pajak yang membayar pajak pada saat jatuh tempo atau tepat waktu.
4. Anggaran pemerintah daerah yang didapat dari masyarakat di salurkan kepada pembangunan-pembangunan daerah seperti memperbaiki jalan-jalan yang rusak, membangun sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan

masyarakat. Karena jika adanya pelayanan yang baik diberikan oleh pegawai maka wajib pajak akan senang membayar pajak karena mereka sadar pajak yang mereka bayar itu adalah kebutuhan untuk mereka juga nantinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pembimbing PBB di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Bapak Syafrudin yaitu: *“pembangunan rumah saat ini semakin berkembang yang hampir mencapai 2000 dilihat dari BPHTB dari pajak jual beli dan perkembangan yang dulunya belum merata kini sudah merata dan cukup baik dari hasil pajak tadi, seperti jalan raya, sarana umum, rumah ibadah, sekolah dan lain-lain. Dan wajib pajak itu sadar akan kebutuhan mereka sehari-hari, bahwa pajak yang mereka bayar dari mereka dan untuk mereka (hasil wawancara).*

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pemungutan pajak bumi dan bangunan di kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau *Baik*, namun dalam hal prakteknya masih belum efektif dengan kata lain target dan realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau belum sesuai dengan yang ditargetkan UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, hal ini dapat dilihat pada bab sebelumnya yaitu pada tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau di targetkan sebesar Rp.4.787.431.481,00 yang terealisasi sebesar Rp.2.007.257.285,00 atau sekitar 42%.
2. Sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sudah dikatakan *Baik* terlihat dari pertanyaan berikut ini :
 - a. Tanggapan responden tentang pendaftaran dan pendataan PBB di UPTD sebanyak 7% responden mengatakan sangat baik, 35 % mengatakan baik, 49% mengatakan kurang baik, dan diikuti dengan responden menjawab tidak baik sebanyak 9%. Jadi mayoritas responden mengatakan kurang baik tentang pendafrtran dan pendataan PBB di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

- b. Tanggapan responden tentang pembayaran PBB di UPTD sebanyak 5% responden mengatakan sangat baik, 47% responden mengatakan baik, 39% responden mengatakan kurang baik dan diikuti dengan 9% responden mengatakan tidak baik terhadap pembayaran PBB. Jadi mayoritas responden mengatakan baik terhadap pembayaran PBB di UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
- c. Tanggapan responden terhadap sanksi PBB di UPTD sebanyak 12 responden mengatakan sangat baik, 44% responden mengatakan baik, 37% responden mengatakan kurang baik dan dilanjutkan dengan 7% responden mengatakan tidak baik tentang sanksi PBB di Kecamatan Mandau. Jadi mayoritas responden mengatakan baik terhadap sanksi PBB di UPTD Kecamatan Mandau.
- d. Tanggapan responden terhadap penyuluhan atau sosialisasi PBB yang dilaksanakan UPTD yaitu sebanyak 7% responden mengatakan sangat baik, 49% mengatakan baik, 35% responden mengatakan kurang baik, dan diikuti dengan 7% responden mengatakan tidak baik. Jadi mayoritas responden mengatakan baik terhadap sosialisasi atau penyuluhan PBB di Kecamatan Mandau.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis baik untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkalis.

6.2 Saran

Setelah memperhatikan hasil-hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran bagi UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan masyarakat sebagai wajib pajak, adapun beberapa saran berikut :

1. Untuk mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau pihak UPTD harus meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan ke rumah-rumah masyarakat atau wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya ke UPTD, supaya masyarakat mau atau tidak enggan untuk mendaftarkan objek pajaknya ke UPTD Pendapatan daerah Kecamatan Mandau.
2. Pihak UPTD harus mendata langsung kelapangan untuk pengukuran objek pajak, supaya tidak terjadinya kesalahan atau manipulasi data objek pajak.
3. Pihak UPTD harus mempertahankan dan kalau bisa meningkatkan tentang sanksi Pajak bumi dan Bangunan, agar masyarakat atau wajib pajak enggan untuk tidak membayar pajak.
4. Diharapkan kesadaran dan peran serta masyarakat lebih ditingkatkan lagi dan memiliki rasa tanggung jawab akan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar PBB. Partisipasi pembayaran pajak adalah wujud keikut sertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah yang aman, tertib, dan lancar, karena pajak itu merupakan kebutuhan kita juga jika kita rajin membayar pajak maka kita juga yang menikmati fasilitasnya.

5. Bagi penulis yang lebih lanjut, penelitian yang belum terasa tuntas pada penelitian ini dapat dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, Keith dan John W. Newstrom. 1999. *“Perilaku Organisasi”*, Jakarta Erlangga.
- Kumorotomo, W. 2007. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lijan, P. 2006. *Reformasi pelayanan publik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ndraha, T. 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Rineke Cipta : Jakarta
- Pasaribu, I. L dan Simandjuntak. B. 2000. *Sosiologi Pembangunan*, Bandung : Tarsito
- Josef, R. K. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada,
- Siagan, S. P. 2005. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Salamat dan Margono, 2001. *Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa*, Malang : LPM Universitas Brawijaya
- Sugiyanto. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Grasindo.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung , 2010.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan dasar kebijakan*, Jakarta : Kencana.
- Sumaryadi, I. N. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta
- Widjaja, HAW. 2009. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wildani, 2010. *Skripsi (pengaruh layanan penerimaan Pajak terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Kantor dispenda kabupaten Rohil)*, Pekanbaru : UIN suska.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Bangunan.

Undang-undang Nomor. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, Media Grafika utama, 2008

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengenaan Pajak Bumi Bangunan.

Undang-Undang Nomor Tahun 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

<http://2frameit.blogspot.com/2012/08/catatan-tentang-faktor-faktor-yang.html>

<http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/pajak-pusat.html>